

RINGKASAN

Baston Hikam Afrijal
NIM 210510378

URGENSI PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/ PT.BDG)
(Husni, S.H., M.H., dan Arif Rahman, S.H., M.H.)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus Herry Wirawan, yang melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan menilai bagaimana implementasi perlindungan HAM terhadap korban anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi Putusan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi argumentasi hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG dan relevansinya dengan perlindungan HAM terhadap korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan sejumlah aspek yang memperberat hukuman, antara lain banyaknya jumlah korban, status korban yang masih di bawah umur, posisi pelaku sebagai pendidik yang seharusnya melindungi, serta akibat yang ditimbulkan berupa kehamilan dan kelahiran anak-anak tanpa ayah. Hakim menjatuhkan hukuman mati dan menambahkan kewajiban restitusi kepada pelaku sebesar Rp331.527.168,00 meskipun diketahui bahwa terpidana tidak memiliki harta untuk membayar. Hal ini bukan semata sebagai ganti kerugian materiil, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak korban dan sebagai simbol keadilan restoratif. Penjatuhan restitusi tetap dilakukan agar negara atau pihak lain dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut dalam kerangka perlindungan korban.

Temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk jaminan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban serta mekanisme pelaksanaan restitusi melalui dana negara. Sistem peradilan pidana harus lebih berpihak kepada korban, dan tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pemulihan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar korban.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, perlindungan Hak Korban, Kekerasan Seksual,

SUMMARY

Baston Hikam Afrijal
NIM 210510378

**URGENCY OF HUMAN RIGHTS
PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF
SEXUAL VIOLENCE CRIMES (A STUDY OF
DECISION NUMBER
86/PID.SUS/2022/PT.BDG)
(Husni, S.H., M.H., dan Arif Rahman, S.H.,
M.H.)**

This research is motivated by the increasing incidence of sexual violence against children, which represents a serious violation of human rights. One of the most prominent cases is the Herry Wirawan case, involving 13 female students in an educational institution. The study aims to analyze the judge's legal considerations in sentencing the perpetrator and to evaluate the implementation of human rights protection for child victims under Indonesian law.

This is a normative legal research using statutory and case study approaches. Data were sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The central focus of this research is the Bandung High Court Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG, which provides insight into the judicial reasoning behind the verdict against the perpetrator of sexual violence against minors.

The findings reveal that the judges imposed an aggravated sentence, including the death penalty and additional restitution, based on several serious factors: the number of victims, their minor status, the betrayal of trust by the perpetrator who was a religious teacher, and the resulting pregnancies and births. Although the convict had no assets to pay the restitution amounting to Rp331,527,168.00, the court still imposed it as a form of symbolic justice and recognition of the victims' rights. This restitution order serves not only to compensate but also to emphasize the state's moral obligation to ensure restorative justice, allowing the possibility for state funds or third parties to fulfill the restitution on behalf of the perpetrator.

Based on these findings, it is recommended that a more comprehensive child protection system be strengthened, including psychological and social recovery programs and mechanisms for state-supported restitution. The criminal justice system should shift its focus toward victim-centered justice, ensuring both the punishment of perpetrators and the fulfillment of victims' human rights.

Keywords: Human Rights, Victim Rights Protection, Sexual Violence.